

**Penilaian tentang pengembangan
sistem regulasi pelayanan
kesehatan:**

Studi kasus di DIY, Bali, Riau

Hanevi Djasri

Pendahuluan

- Bagian dari kegiatan Depkes RI melalui PHP-I (DIY) dan DHS-I (Bali dan Riau) dalam rangka mendukung reformasi bidang kesehatan
- Bentuk kegiatan: *operational research* untuk menyusun desain dan mempersiapkan implementasi pengembangan sistem regulasi pelayanan kesehatan

Definisi Regulasi

- Proses untuk memastikan bahwa standar dan persyaratan hukum terpenuhi bagi pelayanan tertentu atau kegiatan publik

Stewart and Walsh (1992)

Definisi Regulasi

- Suatu mekanisme kontrol yang terfokus dan terus-menerus, dilakukan oleh lembaga publik terhadap aktivitas yang bernilai bagi masyarakat

Tujuan Regulasi Yankes

- Memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat (*community/patient safety*) serta mencapai perbaikan mutu yang berkelanjutan

Utarini (2004)

Cakupan

- **Aktivitas:** lisensi, sertifikasi dan akreditasi.
- **Sasaran :** lembaga, pelayanan dan individu
- **Spektrum:** tradisional, komplementer, modern.
- **Pelaksana:** internal dan eksternal

Utarini (2004)

Efektifitas regulasi

Dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- **Disain** regulasi
- **Informasi** regulator, regulatee, konsumen
- **Kapasitas** regulator
- **Otoritas** regulator
- **Lingkungan**

Hongoro C, Kumaranayake L. (2000)

Hasil penilaian: **Desain**

- Terlalu bersifat administratif, lebih kearah pungutan/PAD (pungutan berlebih)
- Monitoring lemah (atau tidak ada), tidak ada sanksi dan *reward* yang tegas
- Tidak jelasnya proses (berbelit) regulasi, belum diterapkannya konsep akuntabilitas
- Birokrasi rumit (tidak satu atap)
- Tidak responsifnya sistem regulasi terhadap perubahan lingkungan

DHS I (Bali dan Riau)

Monitoring?

Klinik 24 jam ...tanpa dokter



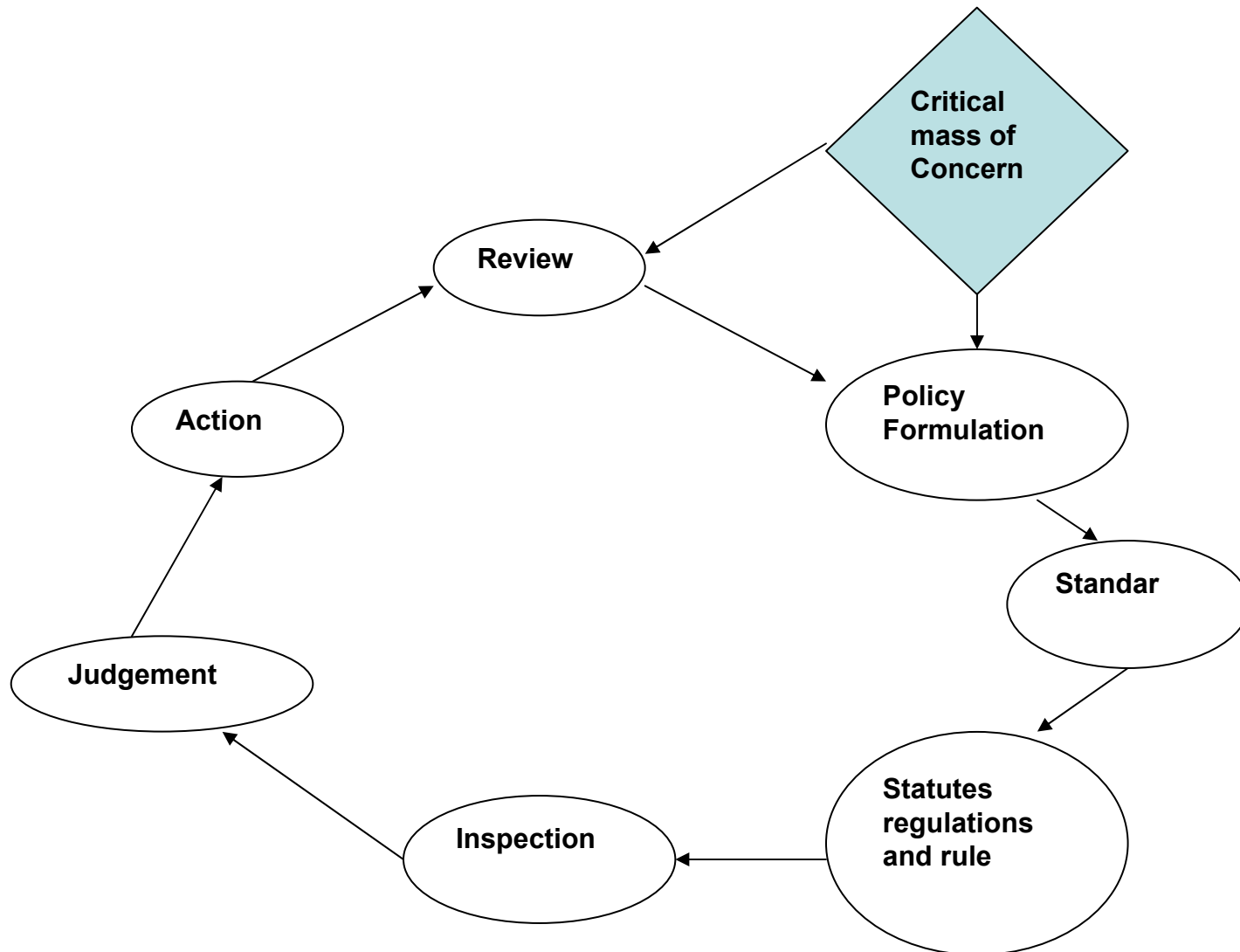
PHP-I DIY
Utarini (2003)

Pembelian antibiotik tanpa resep

Pemberian Antibiotik tanpa resep di Apotik dan Toko obat yang menjadi sample		
25 apotik dari 25 sample apotik di Pekanbaru	=	100%
42 toko obat dari 52 sampel toko obat Pekanbaru	=	80%
6 apotik dari 6 sampel apotik Bangkinang	=	100%
25 toko obat dari 25 toko obat Bangkinang	=	100%

DHS I (Bali dan Riau)

Siklus untuk menyusun regulasi Johnson dan Scheles (2001).



Hasil penilaian: **Informasi**

- Terdapat ketidak-seimbangan informasi antara regulator dan yang diregulasi
 - Kejelasan prosedur pengajuan ijin
- Belum intensifnya sosialisasi regulasi pelayanan kesehatan kepada LSM, media masa, organisasi profesi (dan masyarakat)

DHS I (Bali dan Riau)

Masyarakat tidak mendapat informasi: Wanita Muda Tewas Setelah Disuntik Silikon



Mayat Hilda.



Hasil penilaian: **Kapasitas**

- Kualitas dan kuantitas petugas belum sesuai
- Dana yang tidak mencukupi
- Kapasitas organisasi belum sesuai dengan tanggung jawab regulasi

DHS I (Bali dan Riau)

Kabupaten Sleman:

- Survei ulang: total **1049 sarana pelayanan** modern, komplementer dan tradisional
- Organisasi regulasi: seksi registrasi dan akreditasi (**5 orang**: 2 S1, 1 D3, lainnya SMA), subdin pelayanan medik; seksi promosi subdin pelayanan kesehatan masyarakat
- **1 orang untuk 210 sarana**

Adi Utarini (2003)

Kota Denpasar:

- SDM Subdin bina pemeliharaan kesehatan = **9 orang**
- Anggaran pembinaan dan pelayanan perijinan tahun 2004 **Rp. 10 juta**
- Jumlah sarana yankes = **1.017 buah**
(Rp 9.800,-/sarana) (113 sarana/orang)

18 Apotik dalam 1 KM jalan



DHS I (Bali dan Riau)

Hasil penilaian: **Otoritas**

- Tidak jelasnya standar dan acuan hukum yang digunakan
- Pembagian wewenang yang tidak jelas (contoh: kewenangan Puskesmas dalam peran kewilayahannya)
- *Law enforcement*: “tidak ada” tindakan dan sanksi bagi praktisi yang tidak mengikuti aturan yang ada

DHS I (Bali dan Riau)

yang terucap...

- *“kami baru mau punya rencana meninjau beberapa toko obat, mereka sudah menyiapkan golok di depan tokonya”*

Salah satu informan

DHS-I (Bali dan Riau)

Hasil penilaian: lingkungan

- **Politik:** sangat tergantung dari elit politik, bila memiliki visi tentang kesehatan maka regulasi yankes mendapat perhatian
- **Sosial dan budaya:** setelah reformasi masyarakat menjadi lebih kritis sehingga dapat mendorong efektifitas regulasi
- **Ekonomi:** daerah dengan tingkat ekonomi yang baik ternyata belum tentu memiliki sumber daya regulasi yang lebih baik

DHS I (Bali dan Riau)

Peta kemampuan ekonomi (Bali)

COMMUNITY ECONOMY

BALI PROVINCE		High Community	Low Community
GOVERNMENT ECONOMY	High Capacity	Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Klungkung Kota Denpasar	Kabupaten Buleleng Kabupaten Karangasem
	On/ Low Capacity	Kabupaten Tabanan	Kabupaten Bangli

Laksono Trisnantoro & Deni Herbianto (2004)

Peta kemampuan ekonomi (Riau)

EKONOMI MASYARAKAT		
RIAU PROVINCE	High Community	Low Community
KAPASITAS FISKAL DAERAH High Capacity	Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Karimun Kabupaten Riau. Kepulauan Kabupaten Pelalawan Kota Batam Kota Pekanbaru Kota Tanjung Pinang	Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Natuna Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hulu Kota Dumai
	On/ Low Capacity	

Laksono Trisnantoro & Deni Herbianto (2004)

Hasil penilaian: **Arah pengembangan**

- **Arah:** perijinan (*standar, instrumen, prosedur*) dan akreditasi (*pembinaan, reward system, lembaga diluar RS*)
- **Strategi:** penguatan dinkes (SDM, Struktur, Dana), dan kemitraan (*lembaga yang sudah ada atau membentuk baru, mitra perijinan atau akreditasi?*)
- **Fasilitator:** Dinkes Prop dan Dinkes Kab/Kota + DHS-I
- **Kegiatan → (transisi):** penguatan Dinkes

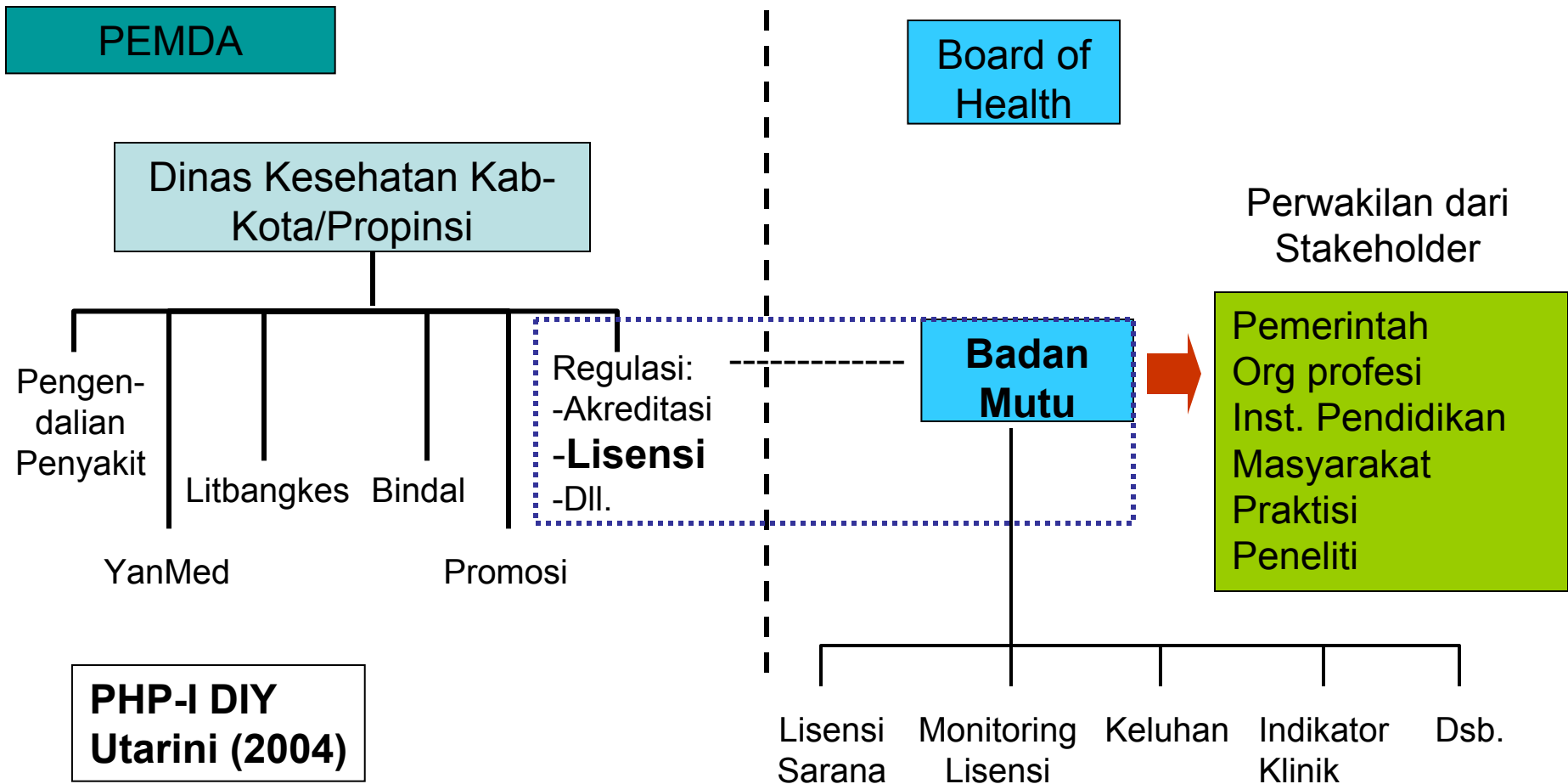
DHS I (Bali dan Riau)

Pengembangan di DIY

MODEL 3: Transisi

Pemerintah (Gov. Acc.)

Swasta (Public Acc)



Kesimpulan 1

- Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas regulasi pelayanan kesehatan baik di Riau dan Bali masih lemah:
 - Disain ☹️
 - Informasi ☹️
 - Kapasitas ☹️
 - Otoritas ☹️
 - Lingkungan 😊

Kesimpulan 2

- DIY telah berusaha meningkatkan efektifitas regulasi dengan:
 - (Disain) Memperbaiki prosedur perijinan
 - (Informasi) Menggunakan beberapa media komunikasi untuk menyebarkan informasi
 - (Kapabilitas) Membentuk badan mutu sebagai mitra Dinkes dalam menjalankan fungsi regulasi
 - (Otoritas) Menyusun perda-perda mengenai perijinan sarana pelayanan kesehatan

Saran

- Untuk menjamin keselamatan masyarakat, maka perlu diperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas regulasi pelayanan kesehatan.
- Perlu adanya komunikasi intensif dan berbagi pengalaman antar daerah yang memiliki rencana meningkatkan efektifitas regulasi.

Pelayanan kesehatan yang aman dan efisien, bagi kita semua..



Sasha & Arvy

Terimakasih

hanevi_pmpk@yahoo.com